

Implementasi Etika Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Pangandaran

Aep Haris

Universitas Galuh

Korespondensi penulis: aepharis@gmail.com

Abstract: *This study aims to obtain an answer in research on the implementation of government ethics in improving the performance of government apparatus in Pangandaran Regency. This study uses a qualitative method with a case study approach intended to obtain phenomena in the field so as to produce descriptive data in the form of written words. Techniques in collecting data in this study is to use technical observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the Implementation of Government Ethics in Improving the Performance of the Pangandaran District Government Apparatus is still not effective in its implementation. This is based on the measurement theory put forward by Edward III (in Agustino, 2014: 149-153) stating that, there are four factors or variables that greatly determine the successful implementation of a policy, namely: (1) Communication, (2) Resources, (3) Disposition, (4) Bureaucratic Structure. Solving problems that must be done to continue to run indicators of bureaucratic structure at the Regional Secretariat of Pangandaran Regency, while continuing to carry out their duties and functions as they should, because the bureaucratic structure can work, and later there will be an increase in performance carried out by all employees in the Secretariat Pangandaran Regency area.*

Keywords: *Implementation, Ethics, Performance*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh suatu jawaban dalam penelitian tentang implementasi etika pemerintahan dalam meningkatkan kinerja aparatur Pemerintahan di Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dimaksudkan agar mendapat fenomena dilapangan sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknis observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Etika Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Pangandaran masih belum efektif dalam pelaksanaannya. Hal tersebut berdasarkan pengukuran teori yang dikemukakan oleh Edward III (dalam Agustino, 2014:149-153) menyatakan bahwa, ada empat faktor atau variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi. Penyelesaian masalah yang harus dilakukan untuk tetap menjalankan indikator struktur birokrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran, dengan tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya, karena dalam struktur birokrasi bisa berjalan, dan nantinya akan ada peningkatan dalam kinerja yang di lakukan oleh seluruh pegawai yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran.

Kata Kunci: Impelemntasi, Etika, Kinerja

I. PENDAHULUAN

Implementasi merupakan suatu penerapan peraturan atau pelaksanaan kerja yang sesuai dengan aturan yang berlaku secara langsung oleh intansi atau organisasi. Kata implementasi berasal dari bahasa inggris “ *to implement* ” yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius guna mencapai suatu tujuan. Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu, *to implement*. *besar to implement* (mengimplementasikan) *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Webster (Endang Soetari. 2014:232).

Selanjutnya Implementasi menurut Meter dan Horn (Budi Winarno 2014:149) menyatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-

Received Juni 30, 2023; Revised Juli 26, 2023; Accepted Agustus 22, 2023

* Aep Haris, aepharis@gmail.com

individu ataupun kelompok yang diarahkan guna mencapai suatu tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.

Adapun pengertian implementasi menurut Winarno (2014:147) merupakan sebuah fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*), maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Pada dasarnya dalam implementasi harus benar-benar dilaksanakan dengan baik agar semua tujuan yang telah di tuangkan dalam bentuk peraturan bisa terlaksana dan nantinya akan berimbang baik terhadap tujuan yang sudah direncanakan sebelum pelaksanaan implementasi tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran sebagai lokasi penelitian dalam hal menjalankan pemerintahan tidak terlepas dari etika yang di buat demi tercapainya pemerintahan yang *Good Governance*, yang mana hal tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Perlu dipahami juga bahwa dalam etika pemerintahan terdapat Kode Etik Aparatur Sipil negara yang mana hal tersebut di atur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, terutama dalam meningkatkan kinerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Pangandaran. Hal itu mengisyaratkan terdapat asumsi yang berlaku bahwa melalui penghayatan etis yang baik, maka seorang aparatur akan dapat membangun komitmen untuk menjadikan dirinya sebagai teladan bagi aparatur pemerintahan dan juga bagi masyarakat. Aparatur pemerintahan yang baik dan bermoral tinggi, akan senantiasa menjaga dirinya agar dapat terhindar dari perbuatan yang tidak diharapkan

Selanjutnya kinerja pegawai dapat diukur pula dari indikator kinerja yang merupakan tolak ukur dalam pencapaian kerja seseorang. Dengan adanya pengukuran kinerja pegawai, organisasi dapat mengetahui sejauh mana tingkat kinerja pegawai sehingga organisasi dapat memberikan umpan balik terhadap hasil pengukuran kinerja, mendorong perbaikan kinerja, dengan pengambilan keputusan sehingga organisasi memiliki sumberdaya yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

II. KAJIAN PUSTAKA

Dalam Studi tentang nilai yang disebut filsafat nilai, teori nilai atau aksiologi pengertian nilai memang sangat bermakna ganda dan mempunyai berbagai dimensi. Misalnya saja menurut Osborne (Syaiful.2013:5) menyatakan bahwa, nilai mempunyai bermacam-

macam makna yang sepadan dengan pengertian baik dan buruk.

Selanjutnya nilai juga beraneka ragam sesuai dengan teori nilai sudut pandang yang di anut. Definisi-definisi tersebut menurut Gie (Syaiful.2013:6) setelah di perbandingkan satu sama lain dan dianalisis lebih mendalam ternyata mengandung kesamaan pengertian, bahwa nilai pada pokoknya adalah suatu objek dari keinginan manusia.

Dalam pencapaian keberhasilan implementasi, Penelitian yang mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Implementasi menurut Edward III (dalam Agustino, 2014:149-153) menyatakan bahwa, ada empat faktor atau variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target grup). Tujuan dan sasaran dari program/ kebijakan dapat disosialisasikan secara baik, sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.
- b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sehingga dengan kehandalan implementor dan dukungan finansial yang memadai, program dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis, sehingga dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi mencakup dua aspek penting, yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *Standard Operating Procedure* (SOP).

Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat

III. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu seperti apa implementasi etika pemerintahan dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan Kabupaten Pangandaran untuk mengetahui lebih dalam lagi maka peneliti menggunakan metode penelitian secara kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (Sugiyono 2020:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek dengan alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara, dokumentasi, dengan analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah. Obyek alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relative tidak berubah. Dengan metode kualitatif ini maka peneliti dapat memahami situasi sosial secara mendalam dan memastikan kebenaran data yang telah diperoleh.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui apakah Implementasi Etika Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Pangandaran, yaitu:

- a. Penelitian yang mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Implementasi menurut Edward III (dalam Agustino, 2014:149-153) menyatakan bahwa, ada empat faktor atau variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi.

Setelah itu, peneliti melakukan reduksi data dengan tujuan agar memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Kemudian peneliti menyajikan data dalam bentuk naratif. Langkah terakhir adalah peneliti menyimpulkan dari temuan temuan peneliti untuk dijadikan suatu kesimpulan penelitian sebagai berikut:

a. Komunikasi

Penelitian Implementasi Etika Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara peneliti, peneliti mendapatkan hasil bahwa sudah tepat dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya komunikasi yang dilakukan oleh

pimpinan dengan bawahan di dalam kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran walaupun dalam prakteknya masih banyak kekurangan dan hal tersebut masih bisa di kategorikan bukan hal yang krusial yang dapat merubah komunikasi antara pimpinan dan bawahan.

Penyelesaian masalah yang dilakukan untuk tetap menjalankan komunikasi dengan baik antara pimpinan dan bawahan hanya dengan tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi dan tetap meningkatkan kinerja pegawai dengan baik sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

b. Sumber daya

Penelitian implementasi etika pemerintahan dalam meningkatkan kinerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara penulis, penulis mendapatkan hasil bahwa sudah tepat dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya sumberdaya yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran sudah cukup memenuhi, walaupun masih ada beberapa sumberdaya pendukung yang memang dirasa masih kurang.

Penyelesaian masalah yang harus dilakukan untuk tetap menjalankan sumberdaya yang ada dengan baik oleh semua pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran hanya dengan memanfaatkan apa yang menjadi tujuan utama dalam pekerjaan yang akhirnya akan memberikan efek baik terhadap kinerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran.

c. Disposisi

Penelitian implementasi etika pemerintahan dalam meningkatkan kinerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara penulis, penulis mendapatkan hasil bahwa sudah tepat dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya indikator disposisi yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran sudah cukup memenuhi, walaupun masih ada beberapa sumberdaya pendukung yang memang dirasa masih kurang.

Penyelesaian masalah yang harus dilakukan untuk tetap menjalankan indikator disposisi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran, dengan tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya, karena dalam disposisi bisa berjalan, dan nantinya akan ada peningkatan dalam kinerja yang di lakukan oleh seluruh pegawai yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran.

d. Struktur birokrasi

Penelitian implementasi etika pemerintahan dalam meningkatkan kinerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara penulis, penulis mendapatkan hasil bahwa sudah tepat dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya indikator struktur birokrasi yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran sudah cukup jelas alur dan arah dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Pangandaran.

Penyelesaian masalah yang harus dilakukan untuk tetap menjalankan indikator struktur birokrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran, dengan tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya, karena dalam struktur birokrasi bisa berjalan, dan nantinya akan ada peningkatan dalam kinerja yang di lakukan oleh seluruh pegawai yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran.

v. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Implementasi Etika Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Pangandaran belum efektif, karena berdasarkan ukuran teori yang dikemukakan menurut Edward III (dalam Agustino, 2014:149-153) menyatakan bahwa, ada empat faktor atau variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Penelitian Implementasi Etika Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara peneliti, peneliti mendapatkan hasil bahwa sudah tepat dalam pelaksanaannya, Penyelesaian masalah yang dilakukan untuk tetap menjalankan komunikasi dengan baik antara pimpinan dan bawahan hanya dengan tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi dan tetap meningkatkan kinerja pegawai dengan baik sesuai dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

2. Sumber daya

Penelitian implementasi etika pemerintahan dalam meningkatkan kinerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara penulis, penulis mendapatkan hasil bahwa sudah tepat dalam pelaksanaannya, Penyelesaian masalah yang harus dilakukan untuk tetap menjalankan

sumberdaya yang ada dengan baik oleh semua pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran hanya dengan memanfaatkan apa yang menjadi tujuan utama dalam pekerjaan yang akhirnya akan memberikan efek baik terhadap kinerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran

3. Disposisi

Penelitian implementasi etika pemerintahan dalam meningkatkan kinerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara penulis, penulis mendapatkan hasil bahwa sudah tepat dalam pelaksanaannya, Penyelesaian masalah yang harus dilakukan untuk tetap menjalankan indikator disposisi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran, dengan tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya, karena dalam disposisi bisa berjalan, dan nantinya akan ada peningkatan dalam kinerja yang di lakukan oleh seluruh pegawai yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran

4. Struktur birokrasi

Penelitian implementasi etika pemerintahan dalam meningkatkan kinerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara penulis, penulis mendapatkan hasil bahwa sudah tepat dalam pelaksanaannya, Penyelesaian masalah yang harus dilakukan untuk tetap menjalankan indikator struktur birokrasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran, dengan tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya, karena dalam struktur birokrasi bisa berjalan, dan nantinya akan ada peningkatan dalam kinerja yang di lakukan oleh seluruh pegawai yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Moleong, Lexy. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosda Karya
- Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial, Cetakan Ketiga*. Bandung: Refika Aditama
- Sugiyono, P. D. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploitatif, Enterpretif Dan Konstruktif*. Edited By Y. Suryandari. Bandung: ALFABETA
- Sudaryono. 2014. *Budaya dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : Lentera Ilmu
- Syaiful. (2013). *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alvabeta.
- Winarno, Budi, 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS. Syafi